



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA
KOMISI A DPRD KOTA YOGYAKARTA

Cermati Kegiatan Kemantren dan Kelurahan untuk Penguatan Wilayah

Wakil Ketua Komisi A memimpin rapat pembahasan.
YOGYA (KR) - Rapat pembahasan terkait Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2024 di tingkat kemantren dan kelurahan berjalan cukup dinamis. Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang menjadi mitra kerja juga melakukan pencermatan secara detail sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Pencermatan kegiatan di ke-

Sejak ada pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah ke perangkat wilayah, anggaran yang diampu oleh tiap kemantren dan kelurahan juga mengalami peningkatan. Kebijakan pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah tersebut juga memberikan keleluasaan bagi perangkat kemantren dan kelurahan dalam menjembatani kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu agar setiap usulan anggaran dan kegiatan tidak mengalami kendala maka prosedur atau tata kala dalam proses perencanaan juga harus dipenuhi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono mengatakan pihaknya secara umum akan terus mendukung program yang digulirkan oleh wilayah. Dengan catatan semua harus menyesuaikan tata kala agar seluruh usulan itu disetujui hingga tingkat pembahasan di Badan Anggaran. "Bagaimana pun kemantren dan kelurahan ini kan sebetulnya pengampu wilayah. Sehari-hari pelayanan juga tidak lepas atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika kegiatan-kegiatan di masyarakat mampu terakomodasi maka sinergi antara masyarakat dengan pemerintah juga akan terban-

gun," katanya.

Keberpihakan Komisi A terhadap penguatan wilayah dibuktikan dengan pencermatan secara detail setiap rencana kegiatan yang disampaikan. Semua anggota dewan bahkan memberikan masukan dan tanggapan. Terhadap usulan kegiatan baru yang belum masuk pada kebijakan umum anggaran tak luput dari masukan. Hal ini karena defisit anggaran pada RAPBD 2024 sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Sehingga sebagai bagian dari politik anggaran, maka kegiatan baru disarankan masuk dalam usulan anggaran perubahan.

Sejumlah kegiatan yang menjadi topik pembahasan tersebut semuanya juga berkaitan dengan kebutuhan di wilayah dalam rangka menjamin ketenteraman dan ketertiban. Di antaranya penambahan CCTV dan wifi publik, apresiasi pelaku seni budaya, dukungan operasional posyandu, kegiatan karangtaruna hingga penguatan pengelolaan sampah berbasis wilayah.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi, mengusulkan supaya kegiatan masyarakat yang berbasis budaya untuk mengakses dana keistimewaan (danais). Pasalnya jika mengandalkan APBD Kota Yogya dikhawatirkan belum mampu mengakomodir seluruhnya. Apalagi kemantren dan kelurahan bagian dari keistimewaan sehingga memiliki peluang dalam mengakses danais.

Di samping itu, dirinya juga meminta aparat di kemantren dan kelurahan agar ikut mendampingi proses penyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat bawah. Hal ini karena sebagian besar usulan kegiatan yang diajukan dalam musrenbang banyak yang bersifat fisik. "Tolong diarahkan supaya usulan itu justru yang nonfisik seperti kegiatan sosial. Masih banyak warga harus patungan untuk mem-

biayai kegiatan. Jangan sampai kehadiran negara justru minim untuk mendukung kegiatan langsung di masyarakat," urainya.

Penyampaian usulan kegiatan yang didahului dari musrenbang menjadi pintu masuk sebagai skala prioritas. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan terakomodir dalam APBD. (Dhi)-f

Anggota Komisi A menyampaikan tanggapan dalam rapat pembahasan.

Pembahasan RKA antara Komisi A dengan unsur wilayah.

Perwakilan kemantren dan kelurahan menyimak pembahasan di Komisi A.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005